

BIG Percepat Penyelesaian Peta RTR 100 BWP RDTR dan 50 RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota



Foto Bersama

Dalam rangka membantu percepatan penyusunan RTRW dan RDTR, pada tahun 2018 Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas Badan Informasi Geospasial (BIG) melakukan bantuan teknis untuk penyusunan peta rencana tata ruang. Bantuan dilakukan kepada 50 RTRW di Provinsi, Kabupaten dan Kota serta 100 BWP RDTR yang berada pada 50 Kabupaten dan Kota. Proses tersebut telah selesai dilaksanakan.

Pada hari senin, 18 Februari 2019, BIG menyerahkan data final dataset tersebut kepada perwakilan pemerintah daerah. Turut hadir dalam acara ini Kepala Badan Informasi Geospasial, Prof. Dr. Hasanuddin Zainal Abidin, M.Sc didampingi oleh Deputi

IGT, Dr. Ir. Nurwajedi, M.Sc serta Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, Dr. Ir. Mulyanto Darmawan, M.Sc. Dalam sambutannya, Kepala BIG menyampaikan bahwa dalam penyusunan peta tata ruang ini diperlukan kerjasama antara pusat dan daerah serta antar sektor di kementerian/lembaga. BIG akan terus melakukan upaya terbaik dalam hal pembinaan, penyediaan data serta percepatan penyelesaiannya. Selama kurun waktu 2018, PPTRA BIG telah mengeluarkan rekomendasi sebanyak 167 RTR dengan 2.040 layanan asistansi (belum termasuk asistansi online). Hal ini merupakan upaya yang terus dilakukan oleh BIG dalam melakukan pembinaan demi meningkatkan kualitas peta tata ruang.

Turut hadir perwakilan dari kementerian yaitu Direktur Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah, Reny Windyawati, S.T., M.Sc serta perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas. Adapun pemerintah daerah hadir dari Aceh hingga Papua untuk menyaksikan secara langsung penyerahan dataset oleh Kepala BIG.

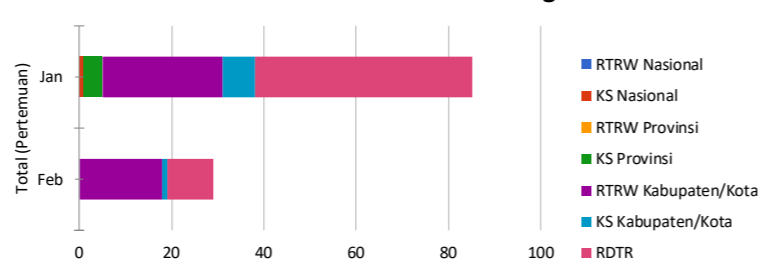
Pada tahun 2019 ini akan dilakukan bantuan teknis serupa berjumlah 150 BWP RDTR dan 100 lokasi RTRW Kabupaten dan Kota. Melalui mekanisme bantuan teknis ini diharapkan bisa membantu pemerintah daerah dalam mempercepat penyelesaian RTRW yang nantinya akan menjadi salah satu dasar penting peraturan daerah. [Chintia Dewi, 2019]

Data Kegiatan Asistansi dan Supervisi Periode Jan - Feb 2019

Peta RTR	Jan	Feb	Jumlah
RTRW Nasional	0	0	0
KS Nasional	1	0	1
RTRW Provinsi	0	0	0
KS Provinsi	4	0	4
RTRW Kabupaten/Kota	26	18	44
KS Kabupaten/Kota	7	1	8
RDTR	47	10	57
Jumlah	85	29	114

PROGRES ASISTANSI & SUPERVISI PETA TATA RUANG

Konsultasi Peta Rencana Tata Ruang 2019



Data Rekomendasi Januari-Februari 2019

Provinsi	Kabupaten	RDTR	Tanggal Rekomendasi
Bali	Buleleng	Gerokgak	2019-01-15

Provinsi	RTRW	Tanggal Rekomendasi
Banten	Serang	2019-01-17
Sumatera Barat	Sijunjung	2019-01-24
Jawa Timur	Kota Malang	2019-01-29
Papua	Nabire	2019-02-18
Banten	Kota Tangerang Selatan	2019-02-19
Banten	Kota Tangerang	2019-02-26

Galeri Pleno Februari 2019



Foto Bersama
Pleno Peta RTRW Kota Tangerang
Provinsi Banten



Foto Bersama
Pleno Peta RTRW Kota Tangerang Selatan
Provinsi Banten



TATA RUANG & ATLAS NEWSLETTER

MEDIA INFORMASI PEMETAAN TATA RUANG, DINAMIKA SUMBERDAYA, DAN ATLAS

Catatan Beranda



Fokus kegiatan kami di Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas untuk 2019 adalah penyiapan rencana program strategis untuk RPJMN 2020-2024 penyelenggaraan informasi geospasial bidang penataan ruang. Memasukkan program kegiatan dalam dokumen perencanaan RPJMN perlu dilakukan, agar sifat kegiatan berkelanjutan dan punya dasar hukum. Walau sebenarnya hal ini tidak selalu berlaku demikian, apalagi adanya isu *money follow program* maka pendanaan kegiatan mengikuti program prioritas nasional, bukan lagi terkait tupoksi.

Tahun 2019 boleh dibilang tahun politis, beberapa bulan lagi tepatnya April 2019 seluruh rakyat Indonesia akan mengikuti pemilihan umum, memilih presiden dan anggota legislatif. Bila berjalan lancar maka oktober ada pelantikan presiden. Konsekuensi peristiwa ini adalah bahwa inilah tahun yang sangat strategis untuk

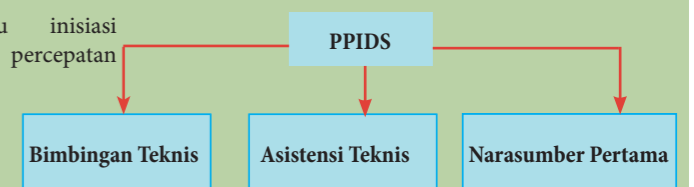
menyusun program dan juga tahun disrupti karena adanya masukan visi misi presiden jelang akhir tahun (oktober). Sehingga semua program yang disusun di awal biasanya akan kembali disesuaikan dengan program baru pemerintah.

Salah satu fokus utama program yang ingin didaftarkan PPTRA adalah percepatan penyusunan peta tata ruang pada skala besar. Semakin dirasakan bahwa semua isu pembangunan nasional ternyata bermuara kepada persoalan tata ruang. Bila baik dan benar tata ruangnya, maka kompleksitas berbagai persoalan pembangunan dengan sendirinya akan baik penyelesaiannya. Pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs) misalnya yang memiliki 17 tujuan pencapaian, 169 target, dan setidaknya 319 indikator dengan sendirinya akan mudah terbantu bila peta tata ruang, khususnya pada skala besar telah selesai dengan baik dan benar.

Oleh karena itu inisiasi memasukkan program percepatan

pelaksanaan penyusunan tata ruang pada tahun 2019 ke dalam RPJMN 2020-2024 ini menjadi momentum yang besar bagi BIG dalam melakukan perbaikan data informasi geospasial bidang penataan ruang. Salah satu persoalan yang sering ditanya ke kami adalah peran perguruan tinggi dalam membantu BIG melakukan validasi peta tata ruang sesuai amanah PP 8/2013 tentang ketelitian peta. Selalu kami katakan perguruan tinggi dapat berperan pada tiga aspek yaitu pemberian bimbingan teknis, pemberian asistansi, dan menjadi narasumber. Tentu bukan hanya persoalan tata ruang, wilayah perbatasan misalnya juga masalah status sumberdaya dan masalah pemetaan sosial indikator SDGs. Oleh karena itu dengan mengucap *bismillahirrohmanirrohim* di tahun 2019, kami akan lebih berusaha mensejajarkan program-program kami di tata ruang dan atlas dengan program penyelenggaraan IG yang lain. [Mulyanto Darmawan, 2019]

Kebijakan & Isu Strategis



Kolaborasi antara Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dirasakan sangat penting dan mendesak saat ini. Gerakan Literasi Nasional (GLN) merupakan momen yang sangat pas untuk menindaklanjuti kolaborasi formal kedua institusi ini. Beberapa tahun terakhir, BIG konsen menyusun atlas bertema pendidikan untuk berbagai jenjang pendidikan. Setelah sukses menyusun Peta dan Atlas Pendidikan untuk SMP, tahun 2019 ini melalui Bidang Atlas dan Pemetaan Sosial kembali menyusun Atlas Pendidikan dan Budaya untuk jenjang SMA. Tujuan pembuatan atlas tersebut adalah sebagai salah satu suplemen sumber pembelajaran terkait informasi geospasial.

Melalui media atlas, program GLN khususnya geoliterasi atau mencerdaskan

secara spasial ditambahkan. Melalui atlas, mengenal wilayah NKRI beserta potensi sumberdaya abiotik, biotik dan kultural sekaligus potensi bencana, diharapkan transfer pengetahuan terkait keruangan dapat dengan mudah tersampaikan kepada peserta didik. BIG bersama-sama dengan Kemendikbud harus makin sering duduk bersama merumuskan kurikulum dan konten informasi geospasial yg akan dijadikan suplemen bahan ajar di setiap level pendidikan. Selain melalui pembelajaran formal, informasi geospasial juga perlu disebarluaskan kepada masyarakat umum, baik lokal maupun mancanegara. Akhir Februari 2019, Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO dibawah Kemendikbud juga mengusulkan kerjasama dengan BIG dalam rangka penyusunan peta dan atlas terkait sebaran lokasi dan informasi warisan-warisan

dunia, *geopark* maupun cagar biosfer yang ada di Indonesia. Hal ini juga merupakan momen penting yang perlu ditindaklanjuti agar situs warisan budaya yang telah diakui dunia dapat dituangkan dalam sajian informasi geospasial yaitu bentuk peta dan atau atlas. Diharapkan informasi ini dapat tersampaikan dengan baik kepada para pengambil kebijakan maupun khalayak umum, sehingga masyarakat dapat ikut serta menjaga keberadaannya.

Masih banyak hal yang dapat dieksplorasi dan dituangkan di dalam atlas yg perlu disampaikan kepada masyarakat luas, yang pada akhirnya menginspirasi dan membuka wawasan kewilayahan dan fenomenanya. Akhirnya, kolaborasi kedua institusi pemerintah ini dirasa sangat *urgent*, dimana BIG dan Kemendikbud disatukan melalui atlas. [Niendyawati, 2019]



Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi :

PUSAT PEMETAAN TATA RUANG DAN ATLAS
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
Gedung F Lantai 2
Jl. Raya Jakarta-Bogor Km 46, Cibinong, Bogor

Telp - PPTRA : (021) 8764613
Fax - PPTRA : (021) 8764613
Email : redaksi.pttra@gmail.com
Twitter : @pptra_big
Instagram : @pptra_big
http://big.go.id/newsletter/

REDAKSI:

| Penanggung Jawab : Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas | Tim Redaksi: Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas |
| Editor: Mulyanto Darmawan, Fakhruddin Mustofa, Sri Eka Wati, Randhi Atiqi, Chintia Dewi |
| Desain Tata Letak: Ika Rosalika |

PEMBINAAN TEKNIS PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS

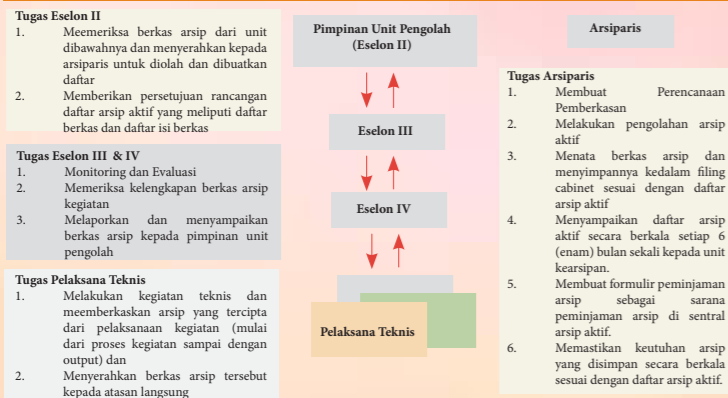
Arsip merupakan bagian penting aktivitas ilmiah sebuah instansi. Bagi BIG, arsip menjadi bagian yang tidak terpisahkan karena produk BIG bermanfaat untuk masyarakat dan semuanya harus tersipkan dengan baik. Berdasarkan Undang-undang No. 43 Thn 2009 Pasal 33 Jo Pasal 81 tentang Arsip dijelaskan bahwa yang tercipta dari kegiatan Lembaga Negara dan kegiatan yang menggunakan Sumber Dana Negara dinyatakan sebagai Arsip Milik Negara. Untuk itu semua pihak di BIG harus menyadari dan mendorong agar arsip produk ilmiah tetap terjaga.

Pada Rabu 23 Januari 2019, Biro Umum dan Keuangan (UK) telah mengadakan Pembinaan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis di Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA). Pihak Biro UK dipimpin oleh Eti Hermayanti selaku Kepala Sub Bag. Kearsipan dan Persuratan dan PPTRA diwakili oleh

Niendyawati selaku Kepala Bidang Atlas dan Pemetaan Sosial beserta pengelola arsip dan Tim Teknis PPTRA. Biro UK selaku penanggung jawab unit kearsipan di instansi BIG dan membina unit eselon lainnya di luar UK. Dalam forum pembinaan tersebut berlangsung dinamis, dua arah, dan suasana kekeluargaan.

Dalam pertemuan tersebut dijelaskan antara lain mengenai pentingnya arsip sebagai sebuah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media. Keberadaan arsip juga menjamin keselamatan dan keamanan aset negara. Dalam konteks Reformasi Birokrasi (RB), arsip menjamin kualitas pelayanan publik, akuntabilitas, dan penataan tata laksana. Semua elemen di PPTRA sebagai bagian dari Unit Pengolah arsip tingkat eselon II memahami keterangan yang disampaikan untuk bertanggung jawab mengolah semua arsip di PPTRA. [Wahyu Tri Handayani, 2019]

Struktur Pengolahan Arsip Aktif di Unit Pengolah



Koordinasi Kegiatan Pemetaan Integrasi Neraca Spasial Untuk Dukungan Kajian Lingkungan Hidup Strategis



Suasana Diskusi

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Dalam konteks penyusunan rencana pembangunan daerah, khususnya RPJMD, pemerintah daerah diwajibkan untuk melaksanakan penyusunan KLHS.

Permendagri No. 7 Tahun 2018 mengatur tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan. Bagian dari KLHS yang digunakan dalam RPJMD adalah gambaran umum kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis daerah, tujuan, dan sasaran strategis. Bagian gambaran umum daerah harus menggambarkan kondisi umum daerah terkait aspek geografis, sumberdaya alam, dan demografis. Salah satu data dan informasi mengenai sumberdaya alam yang digunakan adalah potensi dan ketersediaannya, serta pemanfaatannya yang terangkum dalam Neraca Sumberdaya Alam (NSDA). Dengan demikian, NSDA dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyusunan KLHS karena informasi tentang potensi, pemanfaatan, dan saldo SDA

dapat diperoleh melalui analisis NSDA.

Terkait hal ini, perwakilan Bidang Pemetaan Dinamika Sumberdaya BIG melaksanakan koordinasi dengan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I, Kementerian Dalam Negeri. Koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2019 ini mendiskusikan tentang kegiatan Pemetaan Integrasi Neraca Spasial untuk Dukungan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang akan dilaksanakan di 10 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Kuningan, Majalengka, Cirebon, Kota Cirebon, Gianyar, Klungkung, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Pada kegiatan ini, selain melakukan perhitungan neraca, akan dilakukan pula analisis proyeksi perubahan sumberdaya hutan, lahan, dan kebutuhan air. Dengan analisis proyeksi, diharapkan hasil kegiatan dapat memberikan manfaat yang lebih jauh dalam mendukung penyusunan KLHS.

Selain itu, diserahkan pula hasil kegiatan Pemetaan Integrasi Neraca Spasial DAS Ciliwung dan DAS Cisdane. Produk yang diserahkan berupa album peta (digital), buku populer (digital dan cetak), laporan akhir (digital), dan geodatabase (digital). Untuk hasil kegiatan lainnya yaitu Pemodelan Dinamika Spasial KEK MBTK, Pemodelan Dinamika Spasial KSPN Mandalika, dan Pemodelan Dinamika Spasial Kawasan Andalan Global Hub Bandar Kayangan telah diserahkan pada pertemuan Bulan Desember 2018. [Sri Eka Wati, 2019]

POTRET KEGIATAN

PTRA Berikan Bantuan Uji Akurasi Sumber Data Peta RDTR Perkotaan Nabire



Pengukuran

Nabire adalah nama kabupaten sekaligus nama ibukota kabupaten di Provinsi Papua. Kota Nabire terletak disekitar leher burung Pulau Papua yang menghadap ke Teluk Cenderawasih. Kota Nabire menjadi akses utama menuju beberapa kabupaten di wilayah pegunungan Papua, seperti Paniai, Dogiyai, Deiyai, Jayawijaya, dan Puncak Jaya.

Dalam rangka mengantisipasi kebutuhan lahan dalam perkembangan wilayah kota dan menyelesaikan amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Nabire sudah melakukan perencanaan untuk menyusun Peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Nabire. Penyusunan peta RDTR sudah dimulai sejak tahun 2015, namun terkendala sumber data citra yang digunakan belum sesuai spesifikasi pemetaan skala 5K. Proses penyusunan diinisiasi ulang pada tahun 2018 dan berlanjut ke tahun 2019 untuk proses survei uji akurasi penyiapan peta dasar RDTR.

Survei uji akurasi ini sebagai bentuk bantuan teknis yang dilakukan oleh Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) BIG untuk mempercepat penyusunan peta RDTR Perkotaan Nabire. Kegiatan ini dilaksanakan atas permohonan bantuan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Survei ini bertujuan untuk mengumpulkan koordinat titik kontrol berupa *Ground Control Point* (GCP) melalui pengukuran GPS.

Pelaksanaan survei uji berlangsung selama dua hari pada tanggal 9 dan 10 Februari 2019. Area yang disurvei mencakup beberapa distrik yaitu Nabire, Nabire Barat, dan Teluk Kimi. Secara keseluruhan jumlah titik yang diukur sebanyak 24 GCP. Sebagian data meyakini GCP yang sudah pernah diukur oleh Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponimi (PPRT) BIG, sesuai dengan cakupan CSRT tahun 2014-2018 sebagai sumber data dalam penyusunan Peta RDTR. Proses pengukuran GCP dilakukan secara statik dengan titik referensi CORS Nabire (CNAB) yang berada di Kantor Telkom Nabire. [Iman Sadesmesli, 2019]



Suasana Diskusi

Tim UNESCO Kunjungi BIG Terkait Pemetaan Situs Warisan Dunia di Indonesia

Peta situs-situs warisan dunia di Indonesia hingga saat ini belum terintegrasi ke dalam satu peta. Semua peta dan data terkait lainnya masih terpisah satu sama lain karena berasal dari beberapa Kementerian dan Lembaga. Peta dan data tersebut dikompilasi oleh Komisi Nasional Indonesia untuk *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO). Komisi ini adalah lembaga non struktural pemerintah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibentuk sebagai penghubung antara pemerintah Indonesia dengan salah satu komisi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu UNESCO. Salah satu kegiatan komisi ini adalah melakukan pengusulan berbagai situs di Indonesia agar dimasukkan menjadi situs warisan dunia dan melakukan pengelolaan terhadap berbagai situs di Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia. Salah satu bentuknya adalah pemetaan situs warisan dunia di Indonesia.

Sehubungan dengan itu, Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO melakukan pertemuan awal dengan PPTRA (Kamis/21/02/2019) dan menyatakan ingin melakukan kerja sama untuk melakukan pemetaan situs warisan dunia yang ada di Indonesia. Peta-peta tersebut dibutuhkan sebagai bahan edukasi dan sebagai data bagi para pengambil kebijakan

Pra Survei dan Koordinasi untuk Mendukung Kegiatan Sosialisasi Neraca Spasial Sumberdaya Alam

Kementerian Dalam Negeri telah mengatur tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan yang tertuang dalam Permendagri No. 7 Tahun 2018. Dalam KLHS, bagian gambaran umum daerah harus menggambarkan kondisi umum daerah terkait aspek geografis, sumberdaya, dan demografis. Salah satu data masukan mengenai sumberdaya alam yang digunakan adalah potensi dan pemanfaatannya. Data dan informasi tentang potensi, pemanfaatan, dan saldo SDA dapat diperoleh melalui analisis Neraca Sumberdaya Alam (NSDA). Dengan demikian, NSDA menjadi hal penting dalam mendukung penyusunan KLHS.

Untuk menyebarluaskan pentingnya NSDA dalam mendukung KLHS, PPTRA akan melaksanakan Sosialisasi Neraca Spasial Sumberdaya Alam yang bertema "Pemanfaatan Neraca Spasial Sumberdaya Alam untuk Mendukung Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan RPJMD". Kegiatan ini akan diselenggarakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 21 Maret 2019. Sosialisasi ini akan menghadirkan beberapa narasumber andal dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, dan

Kementerian LHK. Dengan mengundang beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di setiap kabupaten/kota, acara ini diharapkan menjadi ajang bertukar pikiran dan diskusi tentang proses serta kendala dalam penyusunan KLHS.

Sebagai salah bentuk persiapan, tim teknis Bidang Pemetaan Dinamika Sumberdaya melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) pada tanggal 19-22 Februari 2019. Koordinasi dimaksudkan untuk mendapatkan dukungan daerah dalam proses penyebarluasan informasi dan undangan serta keterlibatan beberapa personel di daerah dalam acara sosialisasi. Selain proses koordinasi, dilakukan juga pra survei ke beberapa tempat *meeting* untuk menentukan lokasi acara yang paling representatif. Penentuan lokasi acara menjadi penting karena harus mempertimbangkan kapasitas ruangan, fasilitas yang disediakan, ketersediaan kamar, dan aksesibilitas. Dengan demikian, acara sosialisasi diharapkan dapat berjalan dengan lancar. [Sri Eka Wati, 2019]



Foto Bersama

dalam mengelola situs warisan dunia. Peta-peta yang dibutuhkan di antaranya terkait dengan *Man and Biosphere*, *UNESCO Global Geopark*, *World Natural Heritage*, dan *World Cultural Heritage*.

Man and Biosphere terdiri dari Taman Nasional (TN) Komodo, TN Tanjung Puting, TN Cibodas, TN Gunung Leuser, TN Siberut, TN Lore Lindu, TN Giam Siak Kecil, TN Wakatobi, Taka Bone Rate, Bromo-Tengger-Semeru-Arjuna, Belambangan, Berbak-Sembilang, Betung Kerihun, dan Rinjani - Lombok. *UNESCO Global Geopark*, terdiri dari: Geopark Batur, Gunung Sewu, *Geopark Rinjani*, dan *Geopark Ciletuh*. *World Natural Heritage*, terdiri dari TN Ujung Kulon, TN Komodo, TN Lorentz, dan Hutan Hujan Tropis Sumatera. Sedangkan *World Cultural Heritage*, terdiri dari Candi Borobudur, Candi Prambanan, Situs Manusia Purba Sangiran, dan Bentang Budaya Bali.

Tim Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO yang berkunjung ke PPTRA terdiri dari tiga orang, dipimpin oleh Desi Elvera Dewi, Kepala Sub Bagian Fasilitas UNESCO. Pertemuan dipimpin oleh Kepala Bidang Atlas dan Pemetaan Sosial, Niendyawati, didampingi oleh beberapa orang staf. Beberapa hasil pertemuan adalah kesepakatan menjalin Perjanjian Kerja Sama dengan PPTRA terkait rencana pemetaan situs warisan dunia di Indonesia. Selain itu, komisi ini akan mengundang BIG dalam acara *Focus Group Discussion* (FGD) untuk membahas pemetaan warisan dunia di Indonesia. [Randhi Atiqi, 2019]

RESENSI BUKU

ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN DALAM BERBAGAI SEKTOR

Kebutuhan akan adanya pedoman untuk menyempurnakan dokumen AMDAL ditengah perkembangan pembangunan yang sangat pesat dan beraneka ragam, menjadi motivasi penulis dalam menyusun buku ini.

Penulis membagi bukunya menjadi 6 (enam) bab, yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Penapisan Pembangunan Wajib dilengkapi Kajian Lingkungan, Bab III Rencana Kegiatan Pembangunan, Bab IV Metodologi Analisis Dampak Lingkungan, Bab V Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pembangunan Berbagai Pendekatan Studi, dan Bab VI AMDAL Dalam Berbagai Perspektif.

Pada bagian awal buku diulas mengenai perkembangan pembangunan Indonesia, sistem pembangunan, sistem perencanaan pembangunan, dan pembangunan wilayah. Pada bab kedua dibahas mengenai berbagai kajian lingkungan hidup, ekoregion, daya dukung, baku mutu kerusakan lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan, peluang usaha terbuka untuk investasi pembangunan, dan penapisan dalam AMDAL. Sedangkan pada bab ketiga dibahas mengenai kegiatan pembangunan proyek individual, kegiatan pembangunan kawasan, pembangunan terpadu, serta main issues dan key issues. Menyambung kedua bab sebelumnya, pada bab keempat dikhususkan membahas tentang metodologi, meliputi pelingkupan, analisis dampak lingkungan, metodologi analisis dampak lingkungan, dan kesesuaian metodologi analisis dampak lingkungan.

Selanjutnya pada bab kelima, diuraikan berbagai pendekatan terkait studi AMDAL, meliputi AMDAL pendekatan studi tunggal, AMDAL pendekatan studi kawasan, AMDAL pendekatan studi terpadu, dan AMDAL pendekatan studi tunggal pembangunan sistem penyediaan air minum. Kemudian pada bab terakhir, dijelaskan tentang posisi AMDAL dalam berbagai tahapan proses pembangunan dan ulasan tentang rencana pembangunan regional perbatasan antarnegara kawasan heart of borneo sebagai uji coba.

Melalui uraian-uraian teori serta kajian studi kasus yang disampaikan oleh penulis secara komprehensif, buku ini patut menjadi referensi bagi seluruh *stakeholder* penyusun dokumen AMDAL maupun bagi para pemerhati, peneliti, dan mahasiswa. [Rochmad Budi Santoso, 2019]

Judul Buku : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Berbagai Sektor
 Penyusun : Chafid Fandeli
 Penerbit : Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 2017

